

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 18  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 26 September 2022  
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas Penyesuaian RKA K/L TA 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 37 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);  
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal);  
5. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari);  
6. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);

7. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
8. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
9. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
11. Ir. Ary Sudijanto, M.Sc. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
13. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
14. Natalas Anis Harjanto (Kuasa Direktur Utama/Direktur Operasi Perum Perhutani);
15. Bahrizal Bakrie (Kuasa Direktur Utama/Plt. Direktur Keuangan, Umum/SDM dan MR PT Inhutani I); dan
16. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Penyesuaian RKA K/L TA 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI, sebesar **Rp6.912.784.958.000,00** (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp453.076.374.000,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp93.291.651.000,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp257.816.947.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp1.361.950.098.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.680.183.784.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp643.629.568.000,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp300.977.609.000,00 (tiga ratus miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
- h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp340.236.792.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp291.123.292.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar Rp203.960.941.000,00 (dua ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp380.804.524.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- l. **Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp227.062.921.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- m. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, sebesar Rp296.838.819.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah); dan

- n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp381.831.638.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Anggaran Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengawal penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dan Tahun 2024, sesuai surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.253/Menlhk/Setjen/Ren.0/9/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembangkan mekanisme DAK Fisik Penugasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses politik di Eksekutif maupun Legislatif dan meminta masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI untuk usulan Tahun 2024, selambat-lambatnya bulan Januari Tahun 2023.
  3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI, agar pelaksanaan bimbingan teknis serta pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah pemilihan masing-masing Anggota Komisi IV DPR RI dapat tepat sasaran dan memiliki dampak jangka panjang, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta pelestarian hutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan,

Ttd.

**Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151